

# PERDAGANGAN BUDAK DI BALI PADA ABAD KE XVII–XIX: EKSPLOITASI, GENEALOGI, DAN PELARANGANNYA

## **BALI SLAVE TRADE IN THE 17<sup>TH</sup> – 19<sup>TH</sup> CENTURY: THE EXPLOITATION, GENEALOGY, AND ITS PROHIBITIONS**

I Wayan Pardi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
iwayanpardi65@gmail.com

### *Abstract*

*This article aims to analyze the slave trade in Bali in the XVII-XIX century, trace the genealogy or origins of Balinese slaves, and examine the efforts to ban and abolish slave trade in Bali. This study employs historical writing approach. The findings indicate that the history of slavery in the island of Bali lasted for the XVII-XIX century led by the VOC, the Dutch East Indies government, and local kings. Balinese slaves were generally sold in Batavia, and other areas of the archipelago, in South Africa, and islands in the Pacific Ocean and Indian Ocean. In the context of quality, they were most in demand among other slaves traded in the archipelago. This happened because, in the case of Balinese female slaves, they were known for their beauty, kindness, musical skills, and good knowledge of health, so that Balinese women slaves were ideally employed as housemaids to take care of the kitchen (cooking matter), well (washing dishes/clothes matter), and mattress (having sexual intercourse matter). Meanwhile, the men were known to be well built, obedient and adaptable, so it was suitable for them to work as house keepers, soldiers, and porters at government-owned plantations. Balinese slaves come from captives captured in battlefields, widows without children, debtors, and criminals. During Thomas Stamford Raffles' period, there was an attempt to eliminate the slave trade in the archipelago. Then, it was resumed during the Dutch East Indies government in 1860 which issued regulations to abolish the system of slavery in the Indies and in Bali in particular.*

**Keywords:** Trade, Slave, Concubinage, Bali, Netherlands Indies, Archipelago

### **Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis perdagangan budak di Bali pada abad ke XVII-XIX, melacak genealogi atau asal-usul budak Bali, dan mengkaji upaya-upaya pelarangan dan penghapusan perdagangan budak di Bali. Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah. Temuan menunjukkan bahwa sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh VOC, pemerintah Hindia Belanda, serta raja-raja lokal. Budak asal Bali pada umumnya di jual di Batavia, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Secara kualitas, mereka paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan di pasaran Nusantara. Hal tersebut terjadi dikarenakan misalnya pada kasus budak perempuan Bali, perempuannya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, keterampilannya memainkan musik, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan, sehingga budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurus urusan dapur, sumur, dan kasur tuannya. Sedangkan, laki-lakinya dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi, sehingga sangat cocok dipekerjakan sebagai penjaga rumah, tentara, dan kuli-kuli diperkebunan milik pemerintah. Budak Bali dapat berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda dan di Bali pada khususnya.

**Kata kunci:** Perdagangan, Budak, Pergundikan, Bali, Hindia Belanda, Nusantara

### **Pendahuluan**

Sejak abad ke-17, Bali dapat dikatakan termasuk dalam jaringan lalu lintas perdagangan Internasional. Di pantai-pantai dan pesisir Bali

telah berlangsung perdagangan dengan orang-orang luar (*vreemdelingen*). Di sana telah terjadi perdagangan secara teratur mengikuti angin musim. Saat itu, hasil-hasil dari Pulau Bali yang laku diperdagangkan ke luar adalah bahan

pakaian dari katun (kapas), dan minyak kelapa (Ardika, dkk., 2015: 309). Pada abad itu juga datang orang-orang Belanda pertama (tahun 1597) turun di Kuta dan bertemu dengan banyak penduduk yang membawa barang dagangan (Nordholt, 1980: 34), atau satu tahun setelah mendaratnya kapal pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1596 di Banten (Sudoyo, 2002: 8).

Namun, dalam perkembangan selanjutnya tidak hanya hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil kerajinan dari Bali yang banyak diminati oleh pedagang, akan tetapi para pedagang juga tertarik untuk membeli budak-budak Bali. Hal ini berlangsung terutama ketika terjadi kontak perdagangan antara penduduk Bali dengan para pedagang Belanda. Bahkan, Sutaba, dkk. (1983: 15) menjelaskan sebagai berikut.

“Perkenalan masyarakat Bali dengan Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya pada abad ke-17 dan ke-18 terutama terjadi karena perdagangan budak Bali. Budak-budak Bali banyak dikirim ke berbagai daerah seperti Batavia, Maluku, dan sebagainya.

Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa budak-budak Bali banyak dicari sejak abad ke-17 karena didasari oleh kepentingan penguasa kolonial Belanda (Ardika, dkk., 2015: 310). Menurut Ricklefs (2008: 292) dan Atmadja (2010: 156) pemerintah VOC dan Hindia Belanda sangat membutuhkan Bali karena Pulau Bali adalah pemasok budak yang sangat terkenal sebagai tenaga pelayan dan prajurit. Setiap tahun Bali mengirimkan budak ke Batavia rata-rata sebanyak 1.000 orang (Nordholt, 2009: 52). Bahkan, menurut Robinson (2006: 34) budak Bali tidak hanya dijual di Batavia, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan di penjuru pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Dalam hubungan itu, VOC juga tidak ketinggalan berperan dalam perdagangan budak. Pada tahun 1620 di Badung (Bali Selatan), sebuah loji dibangun oleh VOC sebagai pos untuk pembelian budak. Kemudian, disebutkan lima bulan setelah pendirian Batavia (1619), J.P. Coen menulis kepada Dewan 17 bahwa loji itu sibuk dikunjungi oleh Raja Bali, yang mungkin menawarkan budak untuk dijual (Nordholt, 1980: 34).

Penulisan artikel ini menjadi menarik untuk dilakukan mengingat belum banyaknya masyarakat yang mengetahui bahwa pada abad

ke XVII-IXX terjadi perdagangan budak berskala nasional bahkan internasional di Pulau Bali. Penggambaran keagungan Pulau Bali dewasa ini hanya berpusat pada berbagai sebutan megah yang disandangnya, seperti *Pulau Seribu Pura (The Island of Thousand Temples)* (Pitana, 1994: 5), atau *Pulau Sorga di Bumi (The Paradise Island)* (Hasibuan, 2002: 244), atau julukan yang diberikan oleh Nehru sebagai *The Morning of The World*, ataupun Gregory Bateson menyebutnya dengan nama *The Steady State* (Pitana, 1994: 5), tampaknya berbanding terbalik dengan realita kehidupan masyarakat Bali pada abad ke XVII-XIX yang identik sebagai penghasil budakdi Nusantara atau bisa dikatakan sebagai *Pulau Seribu Budak*.

Perbudakan adalah suatu bentuk kontrol kerja beberapa orang yang secara legal memiliki dan menguasai hidup individu atau sekelompok manusia yang dipaksa bekerja untuk mereka, dan umumnya kehilangan semua atau sebagian besar kebebasannya atau hak-haknya (Sanderson, 2003: 359). Praktik perbudakan dapat diartikan juga sebagai bentuk ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi karena ia (budak) tidak punya pilihan lain saat berada dalam posisi tersebut (Mariana, 2015: 16).

Narasi perbudakan di Bali pada abad ke XVII-XIX jarang sekali dianalisis oleh sejarawan dan diketahui oleh masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang sejarah Bali hanya terpusat pada narasi-narasi besar ketokohan raja-raja dan peristiwa-peristiwa besar yang membanggakan. Ruang yang diberikan dalam buku sejarah tentang perbudakan bisa dikatakan dipersempit atau bahkan dihilangkan sama sekali dalam panggung sejarah Bali, mengingat hal ini dari perspektif manusia modern merupakan aib yang dapat mencoreng keagungan manusia dan pulau Bali. Namun, sebagai manusia masa kini dan manusia masa depan yang tidak bisa hadir tanpa adanya manusia masa lalu, menghadirkan kembali setiap peristiwa-peristiwa sejarah merupakan proyek penting untuk senantiasa dilakukan. Hal tu agar setiap manusia masa kini maupun manusia masa depan dapat belajar dari peristiwa masa lalu.

Apa yang terjadi di Bali tentu saja bukan fenomena khusus yang hanya dialami masyarakat Bali, melainkan daerah-daerah lainnya di Nusantara juga mengalami hal serupa. Selain itu, secara *historis* perbudakan juga sebenarnya juga sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan

Romawi Kuno (Sanderson, 2003: 359). Namun, akan menjadi sangat menarik ketika ditelusuri penyebab budak-budak Bali menjadi sangat diminati bahkan paling diminati untuk diperjualbelikan oleh para pedagang, dibandingkan budak-budak lainnya dari daerah lain di Nusantara. Selain itu, artikel ini juga akan menelusuri genealogis (asal-usul) munculnya budak di Bali dan berusaha mengungkap peran dari pemerintah VOC, Hindia Belanda dan Inggris, serta raja-raja lokal dalam perdagangan budak di Bali.

Ruang lingkup temporal yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari abad ke XVII-XIX. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan karena pada abad ke XVII dimulainya kontak intensif antara orang-orang Bali (dalam hal ini raja-raja lokal) dengan orang-orang Belanda (VOC) dalam perdagangan budak, bahkan selama abad ke XVII jumlah budak yang diekspor dari Bali mencapai 2.000 orang pertahunnya. Sementara itu, pada abad ke XIX intensitas perdagangan budak Bali mulai mengalami kelesuan karena adanya kebijakan-kebijakan dari Thomas Stamford Raffles dan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, pada periode ini dapat dikatakan perdagangan budak Bali meraih popularitasnya tertingginya, sekaligus juga menjadi akhir dari perdagangan budak di Nusantara. Walaupun demikian eksistensi budak Bali sebenarnya sudah ada dan sudah diperdagangkan jauh sebelum abad ke XVII, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Sukawana AI (804 Saka/882 Masehi) yang mencatat tentang adanya "budak".

### **Perdagangan Budak di Bali Abad ke XVII-XIX**

Pada abad ke XVII sampai abad ke XVIII Bali sudah menjadi pusat perdagangan budak (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 68). Lebih menariknya lagi, dalam geliat perdagangan di Nusantara justru intensitas perdagangan budak berhasil melampaui perdagangan hasil bumi dan kerajinan Bali lainnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, ekspor utama Bali adalah budak. Jumlah budak yang diekspor dari Bali mencapai 2.000 orang pertahunnya selama abad ke-17 (Robinson, 2006: 33). Bahkan, di Batavia pada pertengahan abad ke-17,

populasi total budaknya kira-kira 18.000 jiwa dan sekitar separuhnya adalah orang Bali (Robinson, 2006: 34).

Budak-budak Bali pada umumnya tinggal di rumah-rumah bangsawan atau birokrat Eropa, dan istana raja-raja, sebagai penjaga-penjaga dan pesuruh, pelayan, serta dalam kasus lainnya budak-budak tersebut juga dijadikan serdadu-serdadu Belanda. Mereka termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, menjual, dan mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak mampu dilakukan oleh suku-suku lainnya ataupun oleh orang Eropa sendiri. Orang yang termasuk golongan budak tidak hanya terdiri dari kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan (Poesponegoro, 2008: 299).

Perahu-perahu Belanda datang ke bandar-bandar budak di Bali untuk mengangkut budak-budak yang akan dijual ke pulau lain (Poesponegoro, 2008: 90). Meski yang umumnya teribat dalam tahap akhir transaksi budak adalah orang Belanda dan Cina, para Raja Bali dan kepala distrik bertanggung jawab memanen hasil yang paling menguntungkan ini (Robinson, 2006: 33-34).

Budak-budak Bali yang sudah terjual dipasaran harus taat kepada majikannya, mereka harus menurut kepada kemauan pemiliknya untuk melakukan apa saja. Jelas bahwa nasib mereka tergantung kepada pemiliknya, kalau tidak disenangi suatu waktu dapat dijual lagi kepada orang lain (Poesponegoro, 2008: 302). Fenomena tersebut menandakan bahwa permintaan besar dari pedagang swasta dan pemerintah Belanda telah merangsang praktik perdagangan budak di Bali.

Harga-harga budak di pasar pelelangan terutama ditentukan oleh usia, kekuatan mereka, dan juga asal-usul mereka. Namun, pada akhir abad ke-18 harga beli seorang budak perempuan muda tiga kali lipat dari laki-laki. Penyebabnya semakin banyak imigran Cina dan lalu juga orang-orang Belanda yang datang ke Batavia dan mengawini para budak (Shahab, 2002: 25). Menurut Raffles (2014: 876), harga umum dari seorang budak laki-laki Bali adalah sepuluh hingga tiga puluh dolar, dan seorang budak perempuan seharga limapuluh hingga seratus dolar. Sementara itu, Medhurst (dalam Robinson, 2006: 34-35) menjelaskan mengacu pada sebuah kontrak Belanda tahun 1830 tentang pembelian 1.000 laki-laki dengan harga 20 dolar per kepala. Dia juga menyebut kedatangan kaum pedagang

budak Perancis Mauritius, yang membeli sekitar 500 perempuan Bali, dengan membayar 150 rupee untuk perempuan muda dan montok, dan 50 rupee untuk perempuan paruh baya.

Harga budak Bali memang lebih mahal daripada harga budak lainnya, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya di pasaran Nusantara. Hal ini terjadi misalnya pada kasus budak wanita Bali, wanitanya sangat diminati orang-orang Eropa sebab budak wanita orang Bali dikenal karena kecantikannya, kebaikan hatinya, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan (Ardika, dkk., 2015: 310). Alasan lainnya dijelaskan oleh Raffles (2014: 35) karena “di Pulau Bali, beban wanita yang bekerja sebagai petani tidak terlalu berat sehingga menampakkan paras yang lebih cantik dan terawat”. Sementara itu, keadaan fisik wanita-wanita Jawa menurut penjelasan Raffles (2015: 35) yaitu, “...menurut orang-orang Eropa yang telah lama tinggal di sana (Jawa), wanitanya kurang menarik. Hal ini dipengaruhi oleh beban kerja mereka di sawah dan karena seringnya terbakar sinar matahari”.

Perbedaan penggambaran fisik wanita-wanita Bali dengan Jawa oleh Thomas Stamford Raffles, seorang Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda dari tahun 1811-1816 tersebut menyebabkan para budak wanita Bali lebih disukai dan diminati oleh orang-orang Eropa untuk diperkerjakan sebagai pembantu untuk mengurus rumah mereka. Di tambah lagi, “orang Jawa pada umumnya terlalu lamban untuk pekerjaan itu, dan disamping itu mereka enggan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Orang Cina lebih benci lagi dengan pekerjaan itu” seperti yang dipaparkan oleh Mayor William Thorn (2015: 270). Bahkan, lebih lanjut dijelaskan oleh Raffles (2014: 47) bahwa apabila orang Jawa asli pada suatu saat ditangkap dan dijual oleh Bajak Laut, kemudian terbukti bahwa mereka berasal dari Jawa, maka dapat menyebabkan pembelian mereka batal.

Ada beberapa kriteria-kriteria yang digunakan oleh orang-orang Eropa untuk memilih budak wanita yang akan dibeli dan diperkerjakan di rumah-rumah mereka, seperti yang dijelaskan oleh Thorn (2015: 270) sebagai berikut.

“Dalam memilih budak wanita untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang menjadi perhatian utama adalah penampilan mereka dan kemampuan musiknya, serta

kualifikasi-kualifikasi yang menjadi pertimbangan utama. Di sini para budak dinilai karena kecantikan mereka, keterampilan mereka dalam memainkan alat musik siter, dan suara merdu mereka. Kekhasan Asia ini begitu dijunjung tinggi, sehingga di beberapa rumah-rumah orang kaya Eropa, juga di rumah orang-orang kaya pribumi, bisa ditemukan belasan budak perempuan yang mempesona, seolah-olah sang pemilik ingin mewujudkan janji surga di dunia ini seperti yang digambarkan agama Islam”.

Laris manisnya perdagangan budak perempuan Bali yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga juga kemungkinan tidak dapat dilepaskan dari adanya fenomena “pergundikan” di Nusantara. Hidayani (2016: 100) menyatakan para gundik ini biasanya berasal dari para budak yang berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin, yaitu mereka yang tidak berada pada posisi negosiasi atau dapat mengajukan tuntutan apa pun. Baay (2010: 2) juga berpendapat bahwa perempuan yang dijadikan gundik adalah para budak perempuan di rumah tangga Eropa yang kebanyakan melakukannya dengan terpaksa. Fungsinya yaitu *all in*, selain mengurus rumah tangga, para perempuan itu juga mengurus kebutuhan nafsu ranjang para tuannya. Mereka ini memang bukan pelacur yang memungut atas jasa yang telah diberikannya, tetapi mereka juga bukan istri yang sebenarnya, karena tak pernah menikah “secara resmi” (Hidayani, 2016: 100).

Praktik pergundikan sebenarnya didorong oleh adanya kebijakan VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) pada pertengahan abad ke XVII yang membatasi imigrasi perempuan Belanda ke Nusantara (Hera, 2014: 50), sehingga menyebabkan jumlah wanita Belanda lebih sedikit daripada laki-lakinya. Kebijakan ini jelas menimbulkan dampak psikologi bagi para pegawai-pegawai VOC beserta serdadunya karena tidak memiliki tempat untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga memperbudak perempuan lokal untuk dijadikan gundik merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan seks tersebut. Namun, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Hindia Belanda, tetapi juga terjadi di koloni Inggris, Portugis, Perancis, dan Spanyol (Hidayani, 2016: 99).

Oleh karena itu, jika berangkat dari penjelasan di atas, masuk akal jika beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan budak perempuan Bali adalah karena kecantikannya, tampilannya yang mempesona,

keterampilannya memainkan musik dan pertimbangan umur. Hal ini disebabkan karena selain harus mengerjakan tugas di dapur, para budak tersebut (baca: gundik) juga harus melayani tuannya di kasur. Dengan demikian, perjalanan jauh orang-orang Belanda ke Pulau Bali untuk membeli budak sebenarnya hanya merupakan kamufase, tujuannya utamanya adalah untuk mencari gundik untuk dijadikan pelayan seksual. Bila para gundik ini jatuh ke tangan serdadu dan kelasi (golongan pangkat paling rendah dalam angkatan laut) yang bukan keturunan terdidik di kalangan Eropa, maka mereka akan diperlakukan sewenang-wenang, dan tidak ada saling pengertian di antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, jika para gundik ini jatuh ke tangan para pejabat VOC, umumnya keduanya akan memiliki hubungan yang erat, baik sebagai istri ataupun gundik (Hidayani, 2016: 100).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti alasan pemerintah VOC dan pemerintah Hindia Belanda sebagai bangsa yang beradab memperbolehkan atau melegalkan dan ikut berperan aktif dalam bisnis haram perbudakan di Nusantara. Namun, selain pergundikan marak dilakukan oleh orang-orang Belanda (Eropa), para raja-raja lokal di Bali juga turut serta mengkonsumsi budak perempuan untuk dijadikan gundik. Hal ini terekam dalam catatan John Crawfurd (1820) salah seorang mantan residen Inggris di Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa di Bali lazim terjadi pengorbanan para janda ketika suami mereka meninggal dunia dengan cara membakar dirinya. Menurut Crawfurd, (2017: 210) “ketika seorang permaisuri mengorbankan dirinya, praktik ini disebut “*satya*”. (Namun) ketika seorang gundik, budak, atau abdi lainnya, praktik ini disebut “*bela*” atau “pembalasan”.

Pergundikan atau perbudakan seksual merupakan bentuk eksploitasi atas tubuh perempuan yang tidak didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada sedikitpun imbalan yang diterima gundik dalam bentuk materi. Para gundik berkerja di bawah paksaan dan ancaman, serta kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang superior (laki-laki) untuk menjadi pemuas nafsu seks pejabat pemerintahan, kalangan sipil, ataupun militer.

Pekerjaan sebagai seorang budak pembantu rumah tangga (gundik) tidak serta merta selalu berdampak negatif, karena menurut Steinberg (1983: 10) bagi para budak itu sendiri ada untungnya juga. Dalam teori ini, ia tetap orang bebas, bukan budak, kadang-kadang

kedudukannya menjadi lebih baik karena mempunyai ikatan dengan salah seseorang anggota golongan yang berkuasa. Dengan melepaskan kebebasannya menjadi budak-budak itu, ia mendapat perlindungan, hidupnya boleh dikatakan baik, dekat kepada sumber kekuasaan, bebas dari kerja berat, bebas dari membayar apa-apa yang harus dibayar oleh sesamanya sebagai pajak.

Sementara itu, budak laki-laki Bali dikenal sangat loyal dan memiliki keinginan untuk memperelajari hal baru dan cocok untuk kegiatan ketentaraan (Ardika, dkk., 2015: 310). Lekkerkerker (1923) misalnya menyebutkan bahwa selama periode VOC dan Herman Willem Daendels (dalam Ramstedt, 1998: 28) banyak orang Bali merupakan bagian dari tentara Belanda yang dikenal sangat pemberani di medan perang.

Selanjutnya, menurut Robinson (2006: 35) alasan kenapa budak laki-laki Bali begitu diminati Belanda karena lelaki Bali mempunyai reputasi sebagai serdadu yang garang. Para perwira militer Belanda pernah mendapat pelajaran berharga tentang kualitas prajurit Bali dalam tiga ekspedisi militernya (tahun 1846, 1848, dan 1849). Setelah menderita kekalahan pada 1846 dan 1848, Belanda menyerang Buleleng pada 1849 dengan sekitar 15.000 pasukan dan sejumlah kapal perang, dan saat itu pun hanya meraih kemenangan tipis setelah mengantongi bantuan para kolaborator Bali dari Sangsit, kerajaan tetangga Bangli, dan kerajaan Mataram di Lombok. Serangan berikutnya terhadap Klungkung pada 1849 terbukti gagal, yang mengakibatkan kematian komandan militer Belanda. Sebuah uraian kontemporer tentang ekspedisi 1849 menggambarkan orang Bali sebagai lawan militer paling tangguh yang pernah dihadapi tentara kolonial Belanda di Hindia (Robinson, 2006: 35).

Thorn (2015: 341-342) juga menjelaskan mengenai karakter orang Bali yang sangat kuat, tangguh, dan mudah beradaptasi pada lingkungan barunya, yaitu sebagai berikut.

“Penduduk Bali bertubuh kekar, sehingga perekrutan prajurit untuk militer kolonial di Jawa dan pulau-pulau di kawasan Timur, jika dikelola dengan baik, kemungkinan besar akan berhasil di tempat ini. Orang Bali tampaknya paling mudah beradaptasi, di antara suku-suku bangsa di kawasan timur, untuk menjadi tentara-tentara yang handal,

karena mereka sudah biasa tunduk pada kedisiplinan”.

Dengan ciri-ciri fisik seperti yang digambarkan oleh Thorn (2015) di atas, orang Bali sangatlah cocok digunakan sebagai penjaga-penjaga rumah-rumah orang Eropa, ataupun sebagai prajurit-prajurit yang handal di medan pertempuran. Disini dapat diketahui bahwa orang Bali secara lahiriah tidaklah hanya memiliki karakter lemah lembut seperti yang dikenal sekarang, tetapi di masa lalu sanggup melakukan kekerasan fisik dan daya tahan tubuh yang baik. Kebutuhan mempunyai budak laki-laki Bali pada khususnya didasari atas tuntutan akan terjadinya perang yang berlangsung antara Belanda dan Mataram di Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan istilah “Perang Diponegoro” atau “Perang Jawa” (Ardika, dkk., 2015: 310).

Selain untuk tenaga militer dan pembantu rumah tangga ataupun kuli, kompeni Belanda juga memerlukan tenaga budak dalam usahanya, misalnya untuk perkebunan di Banda yang diduduki VOC sejak tahun 1621. Setelah praktis melenyapkan penduduk di Pulau Banda, VOC lalu menyatakan bahwa kebun-kebun pala menjadi miliknya. Masalahnya adalah bagaimana membuat kebun-kebun itu menjadi produktif. Jalan keluar yang ditempuh VOC adalah dengan memberi hak pakai atas kebun-kebun itu kepada bekas tentara dan pegawai VOC. Tenaga kerja di kebun-kebun itu diusahakan oleh VOC melalui tenaga budak yang dikumpulkan dari segenap penjuru tanah air. Budak-budak ini kemudian menjadi penduduk “asli” Banda. Seperti diketahui, penduduk asli yang sebenarnya sudah diangkut ke Batavia sebagai budak, dan yang dapat lolos melarikan diri dari ke pulau-pulau sekitarnya di antaranya ada yang mendirikan kampung-kampung Banda di Kepulauan Kei (Poesponegoro, 2008: 137).

Dengan demikian dapat dilihat peran orang Bali dalam aktivitas perdagangan dan perdagangan budak penting pada abad ke-XVII-XIX. Terlepas dari stigma negatif mengenai budak, perdagangan budak Bali secara umum telah membantu menyatukan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ricklefs (2008: 294), yaitu bahwa “jaringan perdagangan telah menyatukan kepulauan Indonesia dalam cara yang mencerminkan keunggulan komparatif daerah masing-masing. Dengan demikian, kapur barus dari Sumatera, berlian dari Kalimantan Selatan, beras dan tekstil dari

Jawa, budak dari Bali, dan cendana dari Timor diperdagangkan diseluruh jaringan kepulauan yang berpusat di Malaka”.

Oleh karena itu, masuk akal bagaimana pelbagai bagian perdagangan membantu mengikat wilayah menjadi satu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan ekonomi masing-masing daerah telah menjadi benang merah penghubung antara Jawa, Bali, dan daerah-daerah lainnya di Timur dan Barat Nusantara pada masa prakolonial. Mereka bertukar barang atas dasar saling menguntungkan dan membutuhkan. Hubungan perdagangan tersebut, selain melahirkan sebuah jaringan ekonomi yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya juga akan melahirkan jaringan kultural antardaerah (Ricklefs, 2008: 38-39).

### Asal Usul Budak Bali

Perdagangan Budak Bali meraih popularitasnya pada abad ke XVII-XIX, namun yang perlu digarisbawahi bahwa istilah (eksistensi) “budak” di Bali sebenarnya sudah ada jauh sebelum bangsa Barat menginjakkan kakinya di Nusantara. Dalam prasasti Sukawana AI yang berangka tahun 804 Saka/882 Masehi disebutkan sebagai berikut.

Iib.1 “...ana krangan 2. Ampung ya marang hadan padangayana Habana maruna ditu, mas, pirak, kangsabhajana tanbrabhajana, hulu rbwang, karemba, sampi, mulya ma- 3. Saka 4 alapen marhantwangna sesan ya alapna marhantuangna paneken di hyang api kajadyan atithi, anada huma, parlak, padang, ngma- 4.1 kajadyan tmuan hyang tanda.....” (Goris, 1954a: 53).

Artinya:

Iib.1 “...bila ada pasangan suami istri 2. tidak mempunyai keturunan semua harta miliknya yang dibawa bertempat tinggal di sana seperti mas, perak, bejana dari logam, bejana dari tembaga, budak, kerbau, sapi, diambil sejumlah 3.4 masaka untuk biaya upacara kematiannya. Sisa yang diambil dari biaya kematiannya dipersembahkan kepada Hyang Api sebagai persembahan. Bila ada sawah, ladang, tegalan, 4. kebun dipersembahkan sebagai ‘milik’ Hyang Tanda...” (Ardika, dkk., 2015: 180).

Prasasti di atas memberikan penjelasan bahwa pada abad ke-9 di Bali sudah ada masyarakat yang telah memiliki budak dan memposisikan budak sebagai “barang” yang memiliki nilai ekonomis. Dalam budaya

masyarakat Bali (baca: Agama Hindu) juga dikenal adanya *catur kasta* yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan keturunannya di masyarakat, yakni *kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra*. Istilah *catur kasta* pertama kali ditemukan pada masa pemerintahan Anak Wungsu (971-999 Saka atau 1049-1077 Masehi) di Bali, seperti dalam prasasti Bila yang berangka tahun 995 Saka atau 1074 Masehi menyatakan tentang adanya *catur kasta* dalam masyarakat dari lapisan sosial teratas hingga lapisan sosial terbawah yang terdiri dari *kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra* (Ardika, dkk., 2015: 158). Selain empat *kasta* di atas, juga dinyatakan secara eksplisit tentang adanya kelas sosial di bawah kelas *Sudra*, yakni budak. Secara lebih lengkap isi prasasti tersebut adalah sebagai berikut.

“apabila orang-orang jahat yang tidak memperhatikan anugerah raja kepada desa Bila sewilayahnya, kaum brahmana, ksatria, wesya, sudra, budak tua muda, laki-laki, perempuan, kepala rumah tangga, pendeta, nayaka, pengawas dan para sandhibisa, yang mengubah-ubah anugerah paduka raja, sampai akhir jaman, akan selalu diberitakan dengan kematianmu...” (Raharjo, dkk., 1998: 38).

Isi prasasti di atas menjelaskan bahwa struktur masyarakat Bali pada masa pemerintahan Anak Wungsu dibedakan ke dalam empat *kasta* dan ditambah kelas budak. Oleh karena itu, pada dasarnya kelas budak lebih rendah/paling rendah dari empat *kasta* yang dikenal masyarakat. Prasasti Srokodan D = Sukawati C berangka tahun 999 Saka juga memberikan keterangan tentang keberadaan budak, yang berbunyi:

“*kunang ya tan aharp ya sumahwa hutangnya crakannya ikang rarai hulu, irikang pradana*” (Artinya: Adapun andaikata seseorang tidak sanggup membayar hutangnya, agar menyerahkan budak miliknya, kepada orang yang mau memberikan pinjaman) (Tim Proyek Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978: 41).

Hal yang menarik dari isi prasasti Srokodan D = Sukawati C yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Anak Wungsu di atas adalah kelompok *catur kasta* dapat berbuat semena-mena terhadap budak yang dimilikinya. Selain itu, isi prasasti Sukawana AI (804 Saka/882 Masehi) dan Prasasti Srokodan D = Sukawati C

juga memberikan penjelasan penting bahwa pada Masa Bali Kuno budak telah diposisikan sebagai “barang dagangan” yang memiliki nilai jual/berharga atau diperjualbelikan oleh masyarakat, sehingga ketika pemiliknya meninggal ataupun mengalami kesulitan keuangan, budak tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang ingin membeli budak maka ia harus membayar sejumlah uang kepada penjual budak.

Eksistensi kelas budak pada masa Bali Kuno juga terekam dalam prasasti Jaya Pangus, yang menyatakan:

“bila ada anak budak (*rare kawula*) pergi mengungsi ke desa Buyan-Sanding-Tamblingan, maka anak itu tidak boleh ditangkap, ditahan atau dipukul dengan “*duru walatung (?)*” dan dilukai tubuhnya. Jika memukulinya dengan “*duru walatung*”, penduduk desa boleh merebutnya dalam hal ini tidak menyebabkan dosa dan menimbulkan hukuman *gana-gana*” (Raharjo, dkk., 1998: 39).

Isi prasasti di atas dapat memberikan keterangan bahwa status anak budak dilindungi oleh raja. Meskipun demikian, pelanggaran/kejahatan terhadap budak oleh empat *kasta* lainnya tidak mendapatkan sanksi hukum. Dari beberapa prasasti pada masa Bali Kuno di atas juga dapat disimpulkan bahwa struktur masyarakat Bali Kuno tidak hanya terdiri dari empat *kasta*, yakni *kasta Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra*, tetapi juga terdapat kelas budak yang tidak termasuk di dalam empat *kasta* yang dikenal oleh masyarakat Bali pada umumnya. Pengelompokan masyarakat secara vertikal tersebut juga menyebabkan kelas budak tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga siapapun (utamanya *catur kasta*) dapat berbuat semena-mena terhadapnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa kelas budak pada masa Bali Kuno juga sudah diperjualbelikan di dalam masyarakat.

Asal-usul timbulnya kelas budak pada masa Bali Kuno tidak terekam secara jelas di dalam prasasti-prasasti yang ada. Namun, pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Nusantara, timbulnya kelas budak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Budak, menurut konvensi, sah untuk dijual dalam perbudakan termasuk para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para

penghutang, dan kriminal lainnya (Robinson, 2006: 33-34). Hal tersebut relevan dengan penjelasan Poesponegoro (2008: 299-300) yang menyatakan adanya golongan budak disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seseorang tidak dapat membayar utang sehingga anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayaran hutang, karena menjadi tawanan perang dan perdagangan budak.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan penjelasan David J. Steinberg (1983: 10) yang menguraikan sebagai berikut.

“Menjelang akhir abad ke-18 lazim sekali orang mengabdikan karena tidak sanggup membayar hutang, lebih umum daripada perbudakan sepenuhnya, di mana ekonomi dusun makin banyak menggunakan uang. Seorang petani yang mengalami kesukaran ekonomi dan memerlukan uang kontan untuk perkawinan atau membayar kekalahan dalam berjudi, bisa mencari pertolongan atau mendesak diberi pertolongan oleh tetangga atau kepala setempat, sehingga diperolehnya uang atau sesuatu barang. Apa yang dipinjamkannya itu harus dikembalikannya dalam masa tertentu. Jika tidak, maka dia serta orang-orang yang dihidupinya menjadi budak hutang sampai hutangnya itu dilunasi. Selama membudak itu, ia boleh tinggal di dusunnya, bekerja buat kreditornya atau memberi barang sesuatu kepadanya sebagai uang bunga, boleh juga ia bekerja di rumah kreditornya itu dengan diberi makan, pakaian dan perlindungan. Ia tidak digaji sedikitpun, maka beratlah cara membayar hutang yang demikian”.

Banyak budak hutang yang seumur hidupnya tidak dapat membebaskan dirinya. Budak hutang itu amat lazim di daerah yang kekurangan tenaga manusia. Mereka amat menguntungkan kaum kreditor karena merupakan tenaga yang murah, dapat dipergunakan sebagai kekuatan dalam peperangan atau dalam usaha mendapatkan kekuasaan politik (Steinberg, 1983: 10). Selain itu, oleh tuannya budak juga dimanfaatkan sebagai pelindung, seperti yang di jelaskan oleh Anthony (2014: xxiv) “di Asia Tenggara tidak mungkin seseorang mengumpulkan modal tanpa membeli loyalitas dari sejumlah budak, karena yang terakhir ini diperlukan untuk melindungi kekayaannya”.

Seorang penjahat atau kriminal yang tertangkap juga berpeluang menjadi budak, seperti yang dijelaskan oleh Reid Anthony (2014: 163) bahwa penjahat yang tidak sanggup

melunasi denda dijadikan budak, tidak dipenjarakan. Jika hal itu menyangkut soal pencurian atau penikaman, atau utang yang dibayar kepada pihak lainnya, si penjahat akan menjadi budaknya sampai utangnya lunas. Jika denda yang dibayar itu maksudnya untuk raja, penjahatnya bisa dijual untuk melunasinya atau dijadikan budak istana.

Dalam kasus budak Bali, Poesponegoro (2008: 90) memberikan gambaran mengenai asal usul budak Bali tersebut, yaitu sebagai berikut.

“Dipandang dari segi kasta, mereka termasuk golongan bawah. Dalam hubungannya dengan perbudakan di Bali perlu diketahui bahwa tidak semua budak dari golongan rendah. Tawanan-tawanan perang atau hasil *tawan karang* adakalanya berasal dari kasta atas. Budak-budak yang memang berasal dari kelas rendah dalam pandangan masyarakat berbeda dengan budak-budak karena tawanan perang. Umumnya mereka yang disebut belakangan lebih dihargai. Budak-budak, baik yang laki-laki (*sepangan*) maupun yang perempuan (*sepangan luh*), hidup dirumah tuannya dijamin kebutuhan pangannya”.

Lebih lanjut, seorang misionaris Inggris (dalam Robinson, 2006: 34) yang mengunjungi Bali pada awal abad ke-19, menjelaskan latar belakang muncul budak di Bali, yaitu sebagai berikut.

“Sasarannya tidak selalu orang yang bersalah ...tapi mereka yang kebetulan tidak memiliki teman yang berpihak kepadanya (juga ikut) ditangkap dan dijual, barangkali karena kesalahan yang amat sepele, atau bahkan atas alasan palsu atau ngawur. Betapapun, kenyataan harga tertentu yang ditawarkan per kepala, untuk pemuda yang kekar, akan menggoda para raja untuk lebih cepat menghukum (orang-orang) semacam itu supaya bisa dijual, atau terdorong memerangi tetangganya yang lebih lemah, hanya demi tujuan agar punya bahan untuk memasok pasar Belanda”.

Sebuah kuliah pada tahun 1909 yang disampaikan oleh G.F. de Bruyn Kops, Residen Bali dan Lombok (1905-1909) dikutip dalam Robinson (2006: 40) memaparkan tentang penyebab adanya budak Bali, yaitu “jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak lelaki, maka bukan saja hartanya menjadi milik raja, tetapi janda dan anak perempuannya pun

menjadi budak atau selir raja”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab yang melatarbelakangi munculnya budak Bali yaitu para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal.

Dalam struktur sosial masyarakat Bali, adanya fenomena membudak dan memperdagangkan kelas budak sudah dilakukan sejak jaman Bali Kuno hingga mencapai puncaknya ketika para penguasa-penguasa lokal bersentuhan secara langsung dengan Belanda, sehingga kebiasaan raja-raja lokal mengeruk keuntungan ekonomi dari memperjualbelikan manusia (budak) bukanlah menjadi hal yang baru dan tabu dalam kehidupan masyarakat Bali. Adanya sistem *kasta* (*warna*) dan sistem stratifikasi sosial tertutup yang hidup subur pada masyarakat Bali mulai dari jaman Bali Kuno hingga periode kolonialisme dan imperalisme Belanda di Bali juga telah memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan membudak dan termasuk perdagangan budak.

Dalam masyarakat Bali, mobilitas sosial secara vertikal berdasarkan *kasta* agak sulit terjadi, apalagi pada kasus budak. Bahkan, pada masa Bali Kuno (juga pada masa setelahnya) pemerintah menerapkan aturan adanya larangan bagi golongan masyarakat lapisan bawah (terutama yang laki-laki) melakukan perkawinan dengan golongan lapisan masyarakat atas (Ardika, dkk., 2015: 158). Raharjo, dkk. (1998: 42-43) memberikan uraian mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut.

“Perkawinan campur, khususnya antara laki-laki *sudra* dengan perempuan dari *kasta* yang lebih tinggi sangat dihindari. Hukuman bagi perempuan adalah dimasukkan ke dalam api “*labuh geni*” atau ditusuk dengan keris, sedangkan bagi laki-laki ditenggelamkan ke dalam laut dengan cara dibebani di dalam laut (*labuh batu*)”.

Adanya aturan tegas yang melarang mobilitas sosial secara vertikal (perkawinan) dan disertai dengan sanksi yang menyertainya memungkinkan status budak (dan berlaku pada kasus *kasta*) menjadi *ajeg* melekat pada diri seseorang. Aturan diskriminatif tersebut begitu dipertahankan oleh kelas sosial yang diuntungkan, seperti yang diungkapkan oleh Ari Dwipayana (dalam Ardika, dkk., 2015: 318), bahwa dalam masyarakat berkasta, para aristokrat tuan tanah berkolaborasi dengan kaum rokhaniawan (kelas

dominan) untuk mengembangkan kultur hegemoni, yakni sistem *kasta* yang diselenggarakan dari penjabaran ajaran kitab suci (agama). Hegemoni budaya (ideologi dominan) “*kasta*” menggariskan bahwa tiap individu telah ditakdirkan pada kedudukan tertentu. Hal tersebut tentu membuat sistem kehidupan berada dalam tatanan sistem sosial tertutup.

### **Pelarangan dan Penghapusan Perdagangan Budak Bali**

Perdagangan budak di Bali adalah perdagangan dengan kesuksesan terbesar (Raffles, 2014: 876). Bali di abad ke XVII bebas dari campur tangan VOC, tetapi tetap berpengaruh atas kehadiran VOC. Kira-kira sebelum 1650, Bali masih merupakan wilayah jajahan Raja Gelgel. Bali tidak terlalu terlibat dalam perdagangan laut dibandingkan negara-negara lain di Indonesia, tetapi merupakan pengekspor sejumlah besar kapas, beras, babi, ternak, dan unggas. Namun kemudian, otoritas Gelgel runtuh dan Bali menjadi sekumpulan kerajaan kecil dan saling berperang satu sama lain. Pada saat yang sama, kehadiran VOC di Batavia setelah 1619 menciptakan pasar baru yang besar untuk perbudakan. Ekspor manusia ini memperkaya raja-raja di Bali dengancara menjual tahanan-tahanan, dan terutama tawanan perang mereka kepada VOC dan selanjutnya kepada pemerintah Belanda. Maka, perdagangan budak telah ikut andil dalam menciptakan disintegrasi politik di Bali dengan menyediakan sumber daya ekonomi untuk perang dan mengonsumsi tawanan perang antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya.

Dinamika perdagangan budak Bali pada abad ke-17 melahirkan seorang tokoh sejarah yang menyita perhatian kerajaan-kerajaan di Jawa dan penguasa VOC di Batavia selama hampir 3 dasawarsa. Pada tahun 1684, mulai dipertimbangkan tindakan yang lebih keras ketika di sana datang seorang budak yang kelak menjadi musuh yang paling dibenci VOC ketimbang musuh manapun. Orang itu adalah Surapati, seorang budak Bali yang telah menetap di Batavia (Ricklefs, 2008: 181). “...Surapati adalah seorang budak yang berasal dari Bali yang pernah diangkat sebagai *Luitenant* oleh VOC”, seperti yang dijelaskan oleh Poesponegoro (2008: 227).

Seperti kebanyakan budak lainnya, Surapati melarikan diri ke dataran tinggi di

sebelah selatan Batavia dan menjadi pemimpin segerobolan perampok. Pada tahun 1683, secara tidak terduga dia menyerah dan masuk dinas militer VOC. Dia kemudian membantu menangkap seorang putra Sultan Ageng dari Banten yang melarikan diri. Namun, pada Januari 1684, dia menyerang sebuah pasukan VOC, membunuh 20 dari 39 serdadu bekebangsaan Eropa, kemudian melarikan diri ke arah timur setelah terjadi serangan balasan VOC yang menimbulkan banyak korban di kalangan anak buahnya (Ricklefs, 2008: 181).

Pada saat Herman Willem Deandels berkuasa di Hindia Belanda, ia mengirim Van den Bahl ke Bali untuk mendapatkan calon-calon prajurit. Boleh dikatakan ia berhasil membuat suatu perjanjian dengan Raja Badung, I Gusti Ngurah Pemecutan, pada tanggal 28 Oktober 1808. Di samping bertugas sebagai utusan, ia juga bertugas sebagai konsul atau subandar yang bertugas mengawasi pembesar-pembesar orang asing, sebagai importer tunggal yang menentukan jenis-jenis barang yang diimpor (Sutaba, dkk., 1983: 15).

Pada tahun 1811, pemerintahan Deandels berakhir, kemudian digantikan oleh Thomas Stamford Raffles. Di bawah pemerintahan Raffles timbul perubahan besar dalam bidang kebijakan pemerintahannya. Salah satu diantaranya adalah usaha Raffles untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara, yang dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *pandelingschap* (Thosibo, 2002: 15). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Thomas Stamford Raffles dalam bukunya berjudul "*The History of Java*", yaitu sebagai berikut.

"Pendudukan pulau ini oleh Inggris tahun 1811 menyebabkan masalah budak menjadi perhatian utama, meskipun kita tidak bisa langsung melarang perbudakan atau membebaskan para budak yang ada, namun kita bisa sedikit memperbaiki dan mengubah peraturan menyangkut praktik ini sehingga di masa depan seluruh budak dapat dibebaskan. Langkah-langkah darurat diambil untuk mencegah pengiriman budak lebih lanjut, dan setelah dikeluarkannya peraturan yang menganggap perbudakan sebagai praktek kejahatan, maka sejak saat itu wilayah yang dikuasai Inggris akan melarang adanya perbudakan. Praktik perbudakan di Jawa dianggap sia-sia dan bodoh" (Raffles, 2014: 47).

Raffles dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam usaha penghapusan

perbudakan di Nusantara (Thosibo, 2002: 15). Setelah dikeluarkannya kebijakan tentang pelarangan perdagangan budak di wilayah yang dikuasai Inggris, pemerintah mulai menangkap kapal-kapal yang membawa budak, sehingga populasi budak secara bertahap mulai berkurang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Major Willam Thorn yang menyatakan "sejak penaklukan Jawa, UU Inggris mengenai penghapusan perdagangan budak telah dibuat dan diberlakukan di perairan ini, akibatnya beberapa kapal yang mengangkut budak ditangkap oleh kapal patroli kita (Baca: Inggris), dan ini berpengaruh besar menaikkan harga budak yang sudah berada di pulau (Nusantara)" (Thorn, 1815: 271). Jika menyimak penjelasan di atas, maka salah satu dampak dari diterapkannya kebijakan pelarangan perdagangan budak adalah melonjaknya harga budak yang telah sampai di tempat tujuannya. Tentu naiknya harga budak tersebut merupakan hal yang wajar karena dengan semakin sedikitnya orang yang berani menjual-belikan budak maka jumlah budak dipasaran akan semakin sedikit, sedangkan permintaan akan budak tetap stabil.

Kebijakan ituakhirnya juga sampai di Bali. Namun, larangan-larangan perdagangan budak oleh pemerintahan Raffles sangat ditentang oleh Raja Buleleng dan Karangasem, terbukti pada tahun 1814 tentara kedua kerajaan ini menyerang orang-orang Sepoy (Inggris) yang berdiam di Banyuwangi. Pada tahun itu juga Thomas Stamford Raffles mengutus Jenderal Nightingale ke Bali untuk membalas dendam atas tindakan-tindakan raja Buleleng dan Karangasem. Walaupun pada akhirnya Raja Buleleng tunduk kepada Nightingale, rupanya masalah perdagangan budak di Bali masih ada yang melakukan, terutama oleh orang-orang Cina (Sutaba, dkk., 1983: 15; Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 93-94). Hal tersebut ditekankan juga oleh Ricklefs (2008: 292) bahwa "pemerintah Inggris di Jawa telah berperang dengan raja-raja Buleleng dan Karangasem pada tahun 1814 dalam usaha mengakhiri perdagangan budak. Pihak Bali menyerah, tetapi perdagangan budak berjalan terus".

Penghapusan resmi perdagangan budak selama masa peralihan pemerintahan Inggris (1811-1816) menyebabkan pukulan ekonomi yang serius kepada para raja Bali (Robinson, 2006: 34). Setelah terjadinya perpindahan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintah

kolonial Belanda pada tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai usaha untuk membujuk raja-raja Bali (yang pada tahun 1839 berjumlah sepuluh orang) agar bersedia menerima kekuasaan Belanda akan tetapi tidak berhasil. Walaupun Raja Badung setuju untuk menyediakan prajurit-prajurit untuk angkatan perang kolonial, tetapi tetap saja Belanda tidak memiliki pengaruh besar di Pulau Bali (Ricklefs, 292-293).

“Pada tahun 1824 pemerintah Belanda mengutus seorang keturunan Arab bernama pangeran Said Hasan al Habeschi untuk mengadakan perundingan dalam hal sewa-menyewa budak untuk masuk tentara. Tetapi raja-raja Bali tidak terpicat oleh bujukan-bujukan tersebut, hanya raja Badung yang mau menerima. Oleh karena kegagalan ini, pada tahun 1826 pemerintah mengirim Kapten J.S. Wetters. Dia tinggal untuk sementara waktu di Kuta, satu-satunya tempat perdagangan yang ramai di Bali Selatan pada waktu itu. Pada tahun 1827 dia berhasil mengadakan kontrak dengan raja Badung untuk mendapatkan calon-calon tentara” (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978: 94).

Kebutuhan tentara yang begitu banyak dari budak-budak Bali pada awal abad ke XIX juga didasari oleh adanya perang yang berlarut-larut antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro, dan Belanda dengan kaum Padri. Oleh karena itu, ketika Perang Diponegoro berakhir dengan kemenangan mutlak Belanda pada tahun 1830, Belanda merasa tidak perlu lagi mencari calon tentara (Sutaba, dkk., 1983: 16). Hal ini tentu saja berdampak pada lesunya perdagangan budak setelah berakhirnya Perang Diponegoro.

Sebenarnya pada tahun 1665 Belanda pernah mengeluarkan sebuah regulasi yang melarang perdagangan budak kepada pegawai VOC, tetapi hanya diperkenankan kepada orang asing (Ardika, dkk., 2015: 311). Selain itu, pemerintah Inggris bahkan mengadakan pemilihan untuk membuat perdagangan budak illegal yaitu berdasarkan *Slave Act* tahun 1807. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Inggris memainkan peranan penting dalam munculnya perbudakan dan perdagangan budak, dan Inggris sendiri akhirnya melarang perdagangan budak di wilayah Kerajaan Inggris dengan dilaksanakannya *The Slavery Abolition Act* pada tahun 1833 (Ardika, dkk., 2015: 311). Menurut Virginia Thompson (dalam Poesponegoro, 2008: 394)

bahwa penjualan budak-budak di muka umum telah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1854, sedangkan dalam tahun 1860 telah dikeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sama sekali sistem perbudakan di Hindia Belanda.

Di lain pihak, selama abad ke XIX, Bali mengalami serangkaian tragedi alam, budaya, ekonomi, dan politik yang telah mengubah arah kebijakan raja-raja lokal mengenai perdagangan budak. Dramanya bermula dari ledakan alam terbesar yang pernah diketahui umat manusia, yang akibatnya dirasakan oleh Bali bersama pulau-pulau tetangganya. Dari April hingga Juli 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus, menewaskan lebih banyak orang dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang lebih terkenal. Sepuluh ribu nyawa melayang, 38.000 orang diperkirakan mati akibat kelaparan yang menyusul letusan tersebut, dan total korban yang meninggal mungkin mencapai 117.000 orang di Sumbawa, Bali, dan Lombok. Sedikitnya, 25.000 orang mati di Bali. Pulau ini ditutupi oleh abu gunung berapi setebal 20 cm atau lebih, yang menghancurleburkan lahan persawahan. Tragedi ini disertai oleh sejumlah penyakit pes, yang merusak pasokan makanan, dan kelaparan dan wabah cacar datang mengamuk pada tahun 1828. Antara tahun 1850 dan 1888 muncul 7 kali wabah cacar, 5 kali wabah kolera, 4 kali pes, beberapa kali disentri, dan akhirnya pada tahun 1888 sebuah gempa bumi. Korban tewas terbanyak terjadi dalam wabah cacar tahun 1871, menghabiskan 15.000-18.000 orang (Ricklefs, 2008: 293).

Pada awal abad ke XIX, ekonomi Bali masih sangat tergantung pada ekspor budak. Sekitar 2.000 orang dijual oleh para bangsawan Bali setiap tahunnya. Sebaliknya, raja-raja lokal Bali mengimpor terutama koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu, yang dikonsumsi luas oleh masyarakat Bali. Sejak masa pemerintahan sementara Inggris (1811-1816), pemerintah Belanda di Batavia berusaha membatasi dan akhirnya menghapuskan perdagangan budak. Hal ini tentu saja akan mengancam pendapatan para bangsawan Bali, tepat ketika gunung Tambora sedang melancarkan aksi penghancurannya atas ekonomi pertanian Bali (Ricklefs, 2008: 293).

Tetapi, perkembangan ekonomi dan ekologi yang lebih kondusif kemudian menghasilkan suatu transformasi ekonomi. Timbunan abu

gunung tambora segera menaikkan kesuburan tanah, sementara Singapura menjadi pasar ekspor Bali yang baru. Dalam dua dasawarsa, Bali berubah dari daerah pengekspor budak menjadi pengekspor hasil bumi (khususnya beras, kopi, nila) dan daging babi. Bukannya menjual rakyatnya, para raja Bali sekarang membutuhkan mereka untuk menggarap lahan-lahan pertanian (Ricklefs, 2008: 294).

## Penutup

Sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh pemerintah VOC, kolonial Belanda, serta raja-raja lokal. Secara kualitas, budak Bali paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan dipasaran Nusantara. Hal tersebut terjadi dikarenakan, misalnya pada kasus budak perempuan Bali, wanitanya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, keterampilannya memainkan musik dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan. Oleh sebab itu, budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang mengurus urusan dapur, sumur dan kasur tuannya. Sementara itu, laki-lakinya dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi sehingga sangat cocok dipekerjakan sebagai penjaga rumah, tentara, dan kuli-kuli diperkebunan milik VOC dan pemerintah Belanda.

Perdagangan budak sebenarnya sudah ada sejak zaman Bali Kuno yang dibuktikan dengan adanya istilah budak yang tercatat di dalam beberapa prasasti yang ada. Namun, ketika bangsa-bangsa Barat mulai menginjakkan kaki di Nusantara, perdagangan budak Bali baru menemukan momentumnya untuk berkembang ke seluruh penjuru Nusantara dan bahkan ke seluruh dunia. Pada abad ke XVII-XIX asal-usul budak Bali dapat berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda.

Pengalaman historis perbudakan di Pulau Bali yang berlangsung selama abad ke-XVII-XIX memberikan gambaran bahwa pada masa lalu bangsa Indonesia dan masyarakat Bali pada

khususnya pernah mengalami pengalaman pahit terjatuh dalam bisnis perdagangan manusia (budak) yang dilakukan oleh penguasa. Dewasa ini pengalaman-pengalaman tersebut harus mampu dijadikan pelajaran berharga oleh generasi muda agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia (*Historia Magistra Vitae*).

## Daftar Pustaka

- Anthony, Reid. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Waktu Niaga 1450-1680*. Penerjemah: Mochtar Pabottingi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ardika, dkk. (2015). *Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern*. Ed. I Gde Parimartha. Denpasar: Udayana University Press.
- Atmadja, Nengah Bawa. (2010). *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baay, Reggie. (2010). *Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda*. Terjemahan Siti Hertini Adiwoso. *De Njai: Het Concubinaat in Nederlands-Indië*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Goris, R. (1954). *Prasasti Bali I*. Bandung: NV. Masa Baru.
- Hasibuan, Hj. Sofia Rangkuti. (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Hera, FX. Domini BB dan Daya Negri Wijaya. (2014). *Terasing Dalam Budaya Barat dan Timur: Potret "Nyai" Hindia Belanda, Abad XVII-XX*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JAISB)*. Vol. 16, No. 1. Halaman 49-55.
- Hidayani, Fika dan Isriani Hardini. (2016). *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. *Jurnal Muwazah*. Vol. 8, No.1. Halaman 98-105.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.
- Mariana, Anna. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Ed. Ninus D. Andatnuswari. Tangerang: CV. Marjin Kiri.

- Nordholt, H.G.S. (1980). *Macht, Mensen, en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische Politiek, 1700-1840*. Tesis Doktoral Vrije Universiteit Amsterdam (UNPL).
- Nordholt, H.G.S. (2009). *The Spell of Power, "Sejarah Politik Bali 1650-1940"*. Penerjemah: Ida Bagus Putrayadnya. Jakarta: KITLV.
- Pageh, I Made. (2000). *Pengantar Ilmu Sejarah (Buku Ajar)*. Bali: STKIP N Singaraja.
- Pitana, I Gde. (1994). "Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali". Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* (Editor: I Gde Pitana). Denpasar: Ofset BP. Halaman: 3-16.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raffles, Thomas Stamford. (2014). *The History of Java*. Penyunting: Hamonangan Simanjuntak dan Revianto B. Santosa. Yogyakarta: Narasi.
- Raharjo, Supratikno, dkk. (1998). *Sejarah Kebudayaan Bali: Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata*. Jakarta: CV. Eka Dharma.
- Ramstedt, Martin. (1998). *Weltbild, Heilspragmatik und Herrschafts legitimatinin vorkolonialen Bali*. Frankfurt am Main dan Berlin: Peter Lang.
- Ricklefs, M.C. (1994). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robinson, Geoffrey. (2006). *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Sanderson, Stephen K. (2003). *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Shahab, Alwi. (2002). *Robinhood Dari Betawi*. Jakarta: Republika.
- Sudoyo. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Penerjemah: Farid Wajini dan S. Menno. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutaba, Made, dkk. (1983). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Steinberg. (1983). *Alam Kehidupan Petani*, dalam "Elite: Dalam Perspektif Sejarah". Penyunting: Sartono Kartodirdjo. Jakarta: LP3ES. Halaman 1-23.
- Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978). *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Thorn, William. (1815). *Memories of The Conquest of Java; with the Subsequent Operations of British Forces in the Oriental Archipelago*, "Sejarah Penaklukan Jawa". 2015. Penerjemah: Asnawi. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Thosibo, Anwar. (2002). *Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Magelang: IndonesiaTera.
- Widja, I Gede. (1988). *Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- Widja, I Gede. (1991). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Angkasa.

